

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Peningkatan kepercayaan konsumen terhadap perusahaan membuat manajer berusaha memberikan informasi yang terbaik. Informasi yang dibutuhkan oleh pihak eksternal salah satunya adalah laporan keuangan. Informasi akuntansi yang tersaji dalam laporan keuangan merupakan salah satu informasi utama yang dapat diakses oleh investor, kreditur maupun masyarakat untuk menilai kinerja manajer dalam mengelola dana perusahaan. Manajer dapat saja melakukan praktik manajemen laba (*earnings management*) untuk tujuan memperlihatkan kinerja yang baik bagi investor, kreditur maupun pemegang saham.

Selanjutnya informasi keuangan yang berguna tersebut terutama harus relevan, di mana harus memiliki nilai prediktif agar bisa sebagai masukan untuk prediksi yang digunakan oleh investor dalam membentuk harapan mereka tentang masa depan serta memiliki nilai konfirmasi untuk membantu pengguna dalam mengkonfirmasi atau mengoreksi ekspektasi sebelumnya (Kieso, *et. al.*, 2011). Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan tersebut maka dibutuhkan ketepatan waktu dalam pelaporan keuangan supaya perusahaan dapat memberikan informasi yang berguna bagi para penggunanya.

Berdasarkan Peraturan Bapepam No. X.K.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep/346/BL/2011 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala, Bapepam mewajibkan setiap perusahaan publik yang terdaftar di Pasar Modal wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan yang disertai dengan laporan auditor

independen kepada Bapepam selambat-lambatnya akhir bulan ketiga (90 hari) setelah tanggal laporan keuangan tahunan. Ketepatan waktu merupakan salah satu faktor yang penting dalam menyajikan informasi. Walaupun telah diatur dalam Keputusan Peraturan Bapepam No. X.K.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep/346/BL/2011 namun masih banyak perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tidak tepat waktu dalam mempublikasikan laporan keuangannya.

Namun, selain ketepatan waktu dalam publikasi laporan keuangan, kualitas atas pelaporan keuangan juga merupakan hal yang penting. Informasi keuangan juga harus lengkap, netral, dan *free from error* sehingga bisa diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang tulus atau jujur dan benar-benar terjadi atau *faithful representation* (Kieso *et. al.*, 2011).

Akan tetapi, bila diamati telah banyak terjadi kasus keuangan yang muncul di berbagai tempat di seluruh dunia. Beberapa contoh kasus keuangan terbesar adalah adanya kasus kebangkrutan Lehman Brothers yang terjadi pada tahun 2008 (Kompas *Online*, diakses pada November 2015), kasus Worldcom (2002), Enron Corporation (2001), Kanebo Limited (2003), Parmalat (2003), Health South Corporation (2003), American International Group (2005) dan Satyam Computer Services (2009). Kasus keuangan dalam Enron Corporation yaitu perusahaan ini menaikkan laba dan menyembunyikan hutang lebih dari \$1 milyar dengan menggunakan perusahaan diluar pembukuan, memanipulasi dan menyogok pejabat asing untuk memenangkan kontrak di luar Amerika.

Selain pada perusahaan tersebut praktik manajemen laba juga ditemukan di sektor perbankan seperti Robb (1998) yang mendapatkan bukti adanya indikasi pengelolaan laba pada sektor perbankan. Berikutnya kasus keuangan Bank of Credit and Commerce

International (BCCI) dimana kecurangan lebih dari \$13 milyar dana unaccounted, termasuk didalamnya penyuapan, money laundry dan mendukung terorisme.

Penelitian Bertrand (2000) menemukan bukti secara empiris bank di Swiss yang sedikit kurang atau mendekati ketentuan batasan kecukupan modal cenderung untuk meningkatkan ratio kecukupan modal (CAR) mereka agar memenuhi persyaratan. Betty and Petroni (2002) menemukan, dibandingkan *private banks*, *public banks* cenderung memiliki insentif lebih besar untuk melaporkan adanya kenaikan laba secara lebih konsisten. Naciri (2002) mendapatkan bukti empiris adanya indikasi pengelolaan laba pada sektor perbankan.

Tahun 2011 tercatat skandal keuangan yang cukup menghebohkan di dunia perbankan di Indonesia melibatkan manajer bank pada City Bank. Beberapa penelitian pada bank konvensional di Indonesia, juga menunjukkan adanya indikasi praktik manajemen laba yang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Setiawati dan Na'im (2001) yang menemukan bank-bank yang mengalami penurunan *score* tingkat kesehatannya cenderung melakukan *earnings management*. Susanto (2003) menemukan adanya indikasi praktek pengelolaan laba (*earnings management*) yang dilakukan oleh kelompok bank tidak sehat dan salah satu faktor dominan yang mendorong bank melakukan pengelolaan laba tersebut adalah motif meningkatkan kinerja bank.

Endriani (2004) menemukan adanya indikasi *earnings management* pada bank dalam usahanya memenuhi ketentuan kecukupan CAR (*Capital Adequacy Ratio*) yang ditetapkan oleh BI. Dan Arnawa (2006) juga menemukan adanya indikasi praktik manajemen laba dengan cara meningkatkan laba pada perbankan nasional pasca program rekapitalisasi, dan motif meningkatkan kinerja bank juga merupakan salah satu faktor utama yang mempengaruhi bank melakukan manajemen laba.

Berdasarkan kasus keuangan pada perbankan tersebut maka tidak menutup kemungkinan juga terjadi kasus kecurangan dan kejahatan diperbankan syariah. Hal ini dikarenakan Bank syariah dalam operasionalnya memiliki fungsi yang lebih luas dari bank konvensional seperti yang diuraikan dalam Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) 2003 yaitu sebagai Manajer Investasi, Investor, Penyedia Jasa Keuangan dan Lalu Lintas Pembayaran, serta Pengembangan Fungsi Sosial.

Khan (1992), dalam Sofie (2005), mengidentifikasi tujuan laporan keuangan akuntansi syariah antara lain adalah penentuan laba rugi yang tepat dan melaporkan dengan benar dan *adaptable* terhadap perubahan. Adapun data Jumlah Bank Umum Syariah dari Otoritas Jasa Keuangan Indonesia sebagai berikut :



Tabel. 1.1.
Data Statistik Perbankan Syariah di Indonesia
Jumlah Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah(UUS) &
Bank Perkreditan Rakyat Syariah(BPRS)

| Tahun | BUS | UUS | BPRS |
|--------------|------------|------------|-------------|
| 2009 | 6 | 25 | 138 |
| 2010 | 11 | 23 | 150 |
| 2011 | 11 | 24 | 155 |
| 2012 | 11 | 24 | 158 |
| 2013 | 11 | 23 | 163 |
| 2014 | 11 | 22 | 163 |

Sumber : OJK

Pengembangan sistem perbankan syariah di Indonesia dilakukan dalam kerangka dual-banking system atau sistem perbankan ganda dalam kerangka Arsitektur Perbankan Indonesia (API), untuk menghadirkan alternatif jasa perbankan yang semakin lengkap kepada masyarakat Indonesia. Secara bersama-sama, sistem perbankan syariah dan perbankan konvensional secara sinergis mendukung mobilisasi dana masyarakat secara lebih luas untuk meningkatkan kemampuan pembiayaan bagi sektor-sektor perekonomian nasional.

Karakteristik sistem perbankan syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil memberikan alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi masyarakat dan bank, serta menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi, dan menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi keuangan. Dengan menyediakan beragam produk serta layanan jasa perbankan yang beragam dengan skema keuangan yang lebih bervariasi, perbankan syariah menjadi alternatif sistem perbankan yang kredibel dan dapat diminati oleh seluruh golongan masyarakat Indonesia tanpa terkecuali.

Dalam konteks pengelolaan perekonomian makro, meluasnya penggunaan berbagai produk dan instrumen keuangan syariah akan dapat merekatkan hubungan antara sektor keuangan dengan sektor riil serta menciptakan harmonisasi di antara kedua sektor tersebut. Semakin meluasnya penggunaan produk dan instrumen syariah disamping akan mendukung kegiatan keuangan dan bisnis masyarakat juga akan mengurangi transaksi-transaksi yang bersifat spekulatif, sehingga mendukung stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan, yang pada gilirannya akan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian kestabilan harga jangka menengah-panjang.

Dengan telah diberlakukannya Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang terbit tanggal 16 Juli 2008, maka pengembangan industri perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan akan mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat lagi. Dengan progres perkembangannya yang impresif, yang mencapai rata-rata pertumbuhan aset lebih dari 65% pertahun dalam lima tahun terakhir, maka diharapkan peran industri perbankan syariah dalam mendukung perekonomian nasional akan semakin signifikan.

Sebagai lembaga keuangan yang berbasis keyakinan dan penerapan nilai-nilai agama, bank Syariah mendapat beban berat karena dianggap seharusnya mampu menjaga nilai dan etika dalam setiap kegiatan operasional perbankannya. Meskipun pada akhirnya juga harus diakui, *not everyone is honest*, kembali terbukti. Namun jika terjadi praktik manajemen laba pada bank syariah kemungkinan penyebab terjadinya adalah karena lemahnya praktik *good corporate governance*, sehingga penelitian pada bank syariah untuk melihat manajemen laba yang dipengaruhi *corporate governance* menjadi hal yang menarik untuk dibahas. Marihot dan Doddy(2007) mengatakan mekanisme *corporate*

governance telah efektif mengurangi manajemen laba perusahaan perbankan. Ada empat proksi *corporate governance* yang sering dipakai dalam berbagai penelitian yang bertujuan untuk mengurangi konflik keagenan yaitu: komisaris independen, komite audit, kepemilikan institusional, kepemilikan managerial.

Pedoman *Good Corporate Governance* dipersiapkan dan disusun oleh *Task Force* Komite Audit yang dibentuk oleh Komite Nasional Kebijakan *Good Corporate Governance* dengan tujuan agar dunia bisnis memiliki acuan dasar yang memadai mengenai konsep serta pola pelaksanaan *Good Corporate Governance* yang sesuai dengan pola internasional umumnya dan Indonesia pada khususnya. Pedoman ini juga memberikan bimbingan kepada perusahaan Indonesia dalam pembentukan komite-komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris perusahaan.

Pada perusahaan, dewan komisaris ditugaskan dan diberi tanggung jawab atas pengawasan kualitas informasi yang terkandung dalam laporan keuangan. Hal ini penting mengingat adanya kepentingan dari manajemen untuk melakukan manajemen laba yang berdampak pada berkurangnya kepercayaan investor. Untuk mengatasinya dewan komisaris diperbolehkan untuk memiliki akses pada informasi perusahaan.

Dewan komisaris tidak memiliki otoritas dalam perusahaan, maka dewan direksi bertanggung jawab untuk menyampaikan informasi terkait dengan perusahaan kepada dewan komisaris (NCCG, 2001). Selain mensupervisi dan memberi nasihat pada dewan direksi sesuai dengan UU No. 1 tahun 1995, fungsi dewan komisaris yang lain sesuai dengan yang dinyatakan dalam *National Code for Good Corporate Governance* 2001 adalah memastikan bahwa perusahaan telah melakukan tanggung jawab sosial dan

mempertimbangkan kepentingan berbagai *stakeholder* perusahaan sebaik memonitor efektifitas pelaksanaan *good corporate governance*.

Penelitian mengenai keberadaan dewan komisaris telah dilakukan diantaranya Peasnell, Pope, dan Young (1998) meneliti efektifitas dewan komisaris dan komisaris independen terhadap manajemen laba yang terjadi di Inggris. Dengan menggunakan sampel penelitian yang terdiri dari 1178 perusahaan selama periode 1993-1996, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan komisaris independen membatasi pihak manajemen untuk melakukan manajemen laba.

Beasley (1996) menyarankan bahwa masuknya dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan meningkatkan efektivitas dewan tersebut dalam mengawasi manajemen untuk mencegah kecurangan laporan keuangan. Hasil penelitiannya juga melaporkan bahwa komposisi dewan komisaris lebih penting untuk mengurangi terjadinya kecurangan pelaporan keuangan, daripada kehadiran komite audit. Analisis lain dalam penelitian ini menunjukkan bahwa karakteristik komisaris yang berasal dari luar perusahaan (*outsider director*) juga berpengaruh terhadap kecenderungan terjadinya kecurangan pelaporan keuangan.

Selanjutnya yang mempengaruhi manajemen laba adalah komposisi komite audit. Sesuai Kep. 29/PM/2004, komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk melakukan tugas pengawasan pengelolaan perusahaan. Sehingga, baik buruknya kinerja atau kualitas komite audit mungkin juga dipengaruhi oleh karakteristik dewan komisaris. Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI) mengemukakan bahwa komite audit memiliki tujuan untuk membantu dewan komisaris untuk memenuhi tanggung jawab dalam memberikan pengawasan secara menyeluruh atas berjalannya aktivitas perusahaan.

Semakin baik karakteristik yang dimiliki oleh dewan komisaris, mengindikasikan semakin tinggi pula kualitas yang dimiliki komite audit.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33 /PBI/2009 Tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah, Pasal 36 Ayat (1) bahwa kualifikasi anggota Komite Audit paling kurang terdiri dari: a. seorang Komisaris Independen; b. seorang pihak independen yang memiliki keahlian di bidang akuntansi keuangan; dan c. seorang pihak independen yang memiliki keahlian di bidang perbankan syariah.

Kepemilikan manajerial juga berpengaruh terhadap manajemen laba. Jansen dan Meckling (1976) menemukan bukti dan menyatakan bahwa untuk meminimalkan konflik keagenan adalah dengan meningkatkan kepemilikan manajerial di dalam perusahaan. Ross et al. (1999) juga menyatakan bahwa semakin besar kepemilikan manajemen dalam perusahaan maka manajemen akan cenderung untuk berusaha meningkatkan kinerjanya karena ia juga merupakan pemilik dari perusahaan tersebut. Kepemilikan saham yang rendah oleh manajer akan meningkatkan insentif terhadap kemungkinan terjadinya perilaku oportunistik manajer.

Warfield et al. (1995) dalam Herawaty (2008) melakukan penelitian yang menguji kepemilikan manajerial dengan diskresioner akrual dan kandungan informasi laba menemukan bukti bahwa kepemilikan manajerial berhubungan negatif dengan diskresioner akrual. Penelitian oleh Midiastuty dan Machfoedz (2003) juga memberikan bukti bahwa kepemilikan manajerial merupakan salah satu mekanisme yang dapat membatasi perilaku oportunistik manager dalam bentuk manajemen laba

Chtourou et al.(2001) melakukan penelitian mengenai manajemen laba pada perusahaan-perusahaan di US(United State) yang terdaftar di Compustat tahun 1996, hasil penelitian menemukan komite audit memiliki hubungan negatif dengan earning manajemen. Dewan direksi juga memiliki hubungan negatif dengan earning manajemen.

Zahara (2008) meneliti tentang pengaruh Rasio CAMEL terhadap Praktik Manajemen Laba di Bank Syariah. Hasil penelitian empiris menunjukkan secara rata-rata tidak terdapat indikasi praktik manajemen laba yang signifikan pada Bank Syariah di Indonesia berdasarkan laporan keuangan publikasi 2005-2006. Kinerja bank Syariah dengan Rasio CAMEL yang diproksi dengan Rasio CAR dan LDR berpengaruh negatif terhadap praktik manajemen laba tetapi tidak signifikan, sedangkan rasio RORA dan ROA berpengaruh positif terhadap praktik manajemen laba dan tidak signifikan.

Penelitian ini merupakan penelitian replika dari penelitian yang dilakukan oleh Chtourou et al. (2001). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah dari objek penelitian, dimana objek penelitian ini adalah perbankan syariah dan tempatnya di Indonesia, untuk Corporate Governance Chtourou et al. (2001) menggunakan dua proksi yaitu Komite Audit, Dewan Direksi. Sedangkan penelitian ini menggunakan tiga proksi yaitu komposisi komisaris independen, kualitas komite audit dan kepemilikan managerial. Kemudian waktu penelitian ini dimulai dari tahun 2011 s/d 2014 dimana dalam rentang waktu itu jumlah Bank Umum Syariah di Indonesia sudah mulai stabil perkembangannya (lihat tabel 1.1.). Ini juga yang membedakan penelitian pada perbankan syariah yang telah dilakukan oleh Zahara(2008).

Maka dari itu, penelitian ini diberi judul **“Pengaruh *Corporate Governance* Terhadap Manajemen Laba Di Industri Perbankan Syariah Indonesia”**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka pokok permasalahan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah corporate governance mempunyai pengaruh terhadap praktik manajemen laba pada bank syariah?
2. Apakah komposisi komisaris independen mempunyai pengaruh terhadap praktik manajemen laba pada bank syariah?
3. Apakah kualitas komite audit mempunyai pengaruh terhadap praktik manajemen laba pada bank syariah?
4. Apakah kepemilikan manajerial mempunyai pengaruh terhadap praktik manajemen laba pada bank syariah?

1.3 Batasan Penelitian :

Perbankan Syariah terdiri dari 3 kelompok yaitu Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS). Penelitian ini dilakukan hanya pada Bank Umum Syariah(BUS) yang ada diIndonesia periode tahun 2011-2014.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk mendapatkan bukti empiris mengenai:

1. Pengaruh corporate governance terhadap praktik manajemen laba dibank syariah.
2. Pengaruh komposisikomisaris independen terhadap praktik manajemen laba dibank syariah.

3. Pengaruh kualitas komite audit terhadap praktik manajemen laba dibank syariah.
4. Pengaruh kepemilikan manajerial terhadap praktik manajemen laba dibank syariah.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran kepada :

1. Para pemakai laporan keuangan, agar dapat lebih berhati-hati akan adanya praktik manajemen laba sehingga harus lebih hati-hati dalam mengambil keputusan.
2. Bagi akademisi, penelitian ini memberikan tambahan bahan referensi tentang studi corporate governance dan pengaruhnya terhadap praktik manajemen laba pada industri perbankan syariah.

